

**PEMBANGUNAN NEGARA DI DAERAH PERBATASAN (STUDI
PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS TANJUNG BATU
KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015)**

Della Oktavia

Email : dellaoktaviapku@gmail.com

Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

28293-Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In the Development of Border Area State, Karimun Regency is directly adjacent to Malaysia and Singapore. Health services in Kecamatan Kundur seen experiencing problems in health services that are not optimal in providing satisfaction services to patients, the lack of health personnel, facilities and infrastructure so that a constraint in health services.

The purpose of the study is first, to describe how the institutional capacity in implementing health services in Kundur subdistrict. Second, to determine whether the strength dimension (Strength) and its scope or scope (Scope) based on the state building framework in supporting health services. The type of research used is descriptive qualitative research method. The location of this research was conducted at Puskesmas Tanjung Batu Kundur sub-district Karimun regency. Technique of data collecting done by doing observation, interview, and documentation.

Based on the results of the study, the authors draw the conclusion that in the Institutional Capacity in Health Services has not run optimally because of the health side of the lack of skill in the field of expertise and equipment of health facilities and infrastructure are not adequate. And in the Strength and Scope dimensions, it can be seen from the functions of the State that for minimalist function, the minimum is not fulfilled, such as the availability of pharmaceutical stock, the medical device becomes an obstacle in terms of health needs.

Keywords: State Building, Health Service, Karimun District Health Office

PENDAHULUAN

Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktivitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupaun internasional baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengembangan Daerah perbatasan memerlukan suatu langkah strategis dan komprehensif. Daerah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa Daerah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai kegiatan ilegal di daerah perbatasan yang dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu Provinsi yang memiliki Daerah Perbatasan antar negara. Daerah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau mencakup 4 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota yang terbesar pada 13 kecamatan yang

memiliki 19 pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia dan Vietnam.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura. Berdasarkan Surat menggabungkan delegasi Republik Indonesia provinsi Sumatera Tengah, Tanggal 18 Mei 1956 menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status Otonomi Tingkat II yang dikepalai Bupati sebagai Kepala daerah yang membawahi 4 kewedanan, kewedanan tersebut antara lain adalah Kewedanan Tanjung Pinang yang meliputi Kecamatan Bintan Selatan (meliputi Bintan Timur, Galang, Tanjung Pinang Barat dan Tanjung Pinang Timur), kewedanan Karimun yang meliputi Kecamatan Karimun, Kecamatan Kundur dan Kecamatan Moro, Kewedanan Lingga yang meliputi Kecamatan Linggam Singkep dan Senayang, Kewedanan Pulau Tujuh (meliputi wilayah kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat, Bunguran Timur). Kewedanan Karimun yang membawahi Kecamatan Karimun. Kabupaten Karimun berupa wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikan negara ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Program pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia seutuhnya. Terutama daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil sangat

membutuhkan pelayanan yang optimal. Terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (1). Salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang, kesehatan sangat menunjang dalam setiap aktivitas manusia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan hak hidup sehat setiap warga negara termasuk penduduk miskin dan tidak mampu. Tanggung jawab pemerintah termasuk di dalamnya komponen penyediaan layanan kesehatan yang mudah, murah dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Pelayanan kesehatan harus mempunyai nilai-nilai kepuasan yang terukur sehingga dapat menjadi acuan dalam peningkatan kualitas layanan. Bidang kesehatan haruslah memberikan pelayanan kesehatan secara cepat, tepat, ramah, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Namun pada kenyataannya saat ini sering kali kita temukan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat mengalami permasalahan dalam mendapatkan pelayanan bidang kesehatan yang mereka butuhkan. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi jika pelayanan bidang kesehatan memahami dengan baik konsep pelayanan publik yang bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat pengguna layanan kesehatan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan juga berdampak pada meningkatnya tuntutan untuk mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan yang lebih baik.

Dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk melakukan pengobatan di Puskesmas Tanjung Batu. Fenomena yang terdapat di Puskesmas Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun yaitu :

1. Masih kurangnya tenaga medis dan kurangnya keahlian tenaga medis dalam pelayanan diberikan terhadap pasien.
2. Tidak adanya penempatan dokter spesialis di Puskesmas Tanjung Batu.
3. Kurangnya kedisiplinan tenaga medis dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tanjung Batu yang tidak memuaskan dan keterbatasan sarana dan prasarana di Puskesmas tersebut.

Atas dasar tersebut maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **Pembangunan Negara Di Daerah Perbatasan (Studi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Tahun 2015).**

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Kapasitas Kelembagaan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Kundur ?
2. Apakah Dimensi Kekuatan (*Strength*) dan Dimensi Cakupan atau Ruang Lingkup Peranannya (*Scope*) berdasarkan kerangka kerja State Building dalam mendukung pelayanan kesehatan?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Studi Terdahulu

Kajian mengenai Pembangunan negara di daerah Perbatasan telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Rahman Mulyawan dalam penelitian berjudul “Implikasi Kebijakan Pembangunan Pertahanan di Wilayah Antar Negara dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus di Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Timor leste)”. Dari hasil penelitiannya dilakukan dapat disimpulkan : Pertama, belum konsistennya pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memahami dan menghayati isi daripembangunan bidang pertahanan dalam konteks otonomi daerah sehingga pembangunan bidang pertahanan belum dapat dijadikan pijakan yang kuat untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai wilayah yang aman dengan masyarakat yang sejahtera. Kedua, secara substansial terdapat beragam persepsi tentang pembangunan bidang pertahanan menurut kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu dan *trend* perkembangan kondisi hankam, sosial budaya, politik, ideology bahkan situasi global. Adanya ragam

persepsi ini diasumsikan karena belum adanya kesamaan persepsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menterjemahkan prinsip pembangunan bidang pertahanan dalam konteks otonomi daerah secara positif. Ketiga, suatu kenyataan bahwa masyarakat di perbatasan RI-RDIL tengah berada dalam proses perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terjadinya perubahan ini karena secara politis, bangsa Indonesia tengah meninggalkan pasca politik Orde Baru dan tengah memasuki era baru yang dikenal dengan era reformasi yang memiliki iklim berbeda dari iklim politik sebelumnya. Indiikator mendasar pada era ini adalah perubahan konstitusi dan sejumlah perangkat perundang-undangan, serta perubahan perilaku warrga negara kearah demokratisasi dalam segala aspek kehidupan yang terindikasi terjadinya perubahan kualitas nasionalisme masyarakat tersebut. Kenyataan ini pada gilirannya berdampak terhadap perlunya perubahan dalam sistem pembangunan pertahanan di Kabupaten Belu yang dapat dilakukan melalui kebijakan yang bernuansa (konteks) otonomi daerah.

Rafni Puspita Pohan, 2013 penelitiannya tentang “Pelayanan Publik Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Maroyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2013”. Dapat disimpulkan yakni : pertama, pelayanan publik pada pusat kesehatan masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru 2013 belum dapat berjalan dengan optimal, karena belum tercapainya standar minimal pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kedua, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pelayanannya agar optimal yaitu kurangnya tenaga medis baik dokter umum, maupun dokter spesialis, keterbatasan stock obat-obatan, sarana dan prasarana yang belum memadai dan sumber keuangan Puskesmas yang masih minim dan perlu perhatian pemerintah dengan meningkatkan jumlah anggaran dan bantuan ke Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

2. Francis Fukuyama *State Building*

Berdasarkan teori Fukuyama yang menjelaskan bahwa persoalan penting yang dihadapi negara-negara pinggir yang menghalangi mereka untuk menikmati pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pembangunan kelembagaan mereka yang tidak memadai. Mereka tidak memerlukan negara yang luas, namun mereka sungguh memerlukan negara yang kuat dan efektif. Memperkuat negara-negara tersebut melalui berbagai bentuk pembangunan bangsa adalah sebuah tugas yang menjadi sangat penting bagi keamanan internasional, namun merupakan tugas yang tidak banyak dikuasai oleh negara-negara maju.

Menurutnya, suatu negara yang kuat mampu melahirkan kebijakan dan aturan-aturan yang ditaati masyarakat, tanpa perlu menebarkan ketakutan, kecemasan, dan paksaan yang berlebihan. Negara dan kemampuan seperti inilah yang sering

disebut sebagai negara yang sukses dan kuat (*strong state*), yakni suatu pelembagaan otoritas yang menjadi landasan pertumbuhan setiap individu dalam masyarakat yang otonom, bebas, sejahtera, dan tertib. Sebaliknya negara yang lemah (*weak state*) akan mudah tergelincir dalam anarki, kekacauan, dan pada akhirnya semakin merendahkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

kerangka kerja *State Building*, dimensi kenegaraan yang dimaksudkan Fukuyama adalah upaya kita untuk memahami negara dari dua dimensi berbeda yaitu dimensi kekuatannya (*Strength*) dan dimensi cakupan atau lingkup perannya (*Scope*). Dimensi kekuatan (*Strength*) menitikberatkan pada kemampuan negara merencanakan dan menjalankan berbagai kebijakan dan memberlakukan undang-undang secara bersih dan transparan. Dimensi inilah yang menurut Fukuyama harus diperkuat untuk menciptakan daya dukung negara dalam membangun cita-cita yang diinginkan.

Lingkup atau *Scope* suatu negara ditentukan secara efektif berbagai kegiatan publik, seperti membentuk sistem pertahanan dan peradilan, menciptakan regulasi dalam dunia ekonomi, mewajibkan sistem pendataan penduduk, memungut pajak, membangun infrastruktur dan semacamnya. Agar tidak menimbulkan keraguan antara kekuatandan lingkup, Fukuyama mencoba membuat uraian luas tentang dimensi kenegaraan tersebut melalui indikator-indikator tertentu. Untuk memahami tentang lingkupnegara, Fukuyama mengutip kategorisasi yang dibuat oleh Bank Dunia terkait dengan fungsi-fungsi negara yang dibagi menjadi tiga

kategori yaitu minimal, menengah, hingga aktivis.

TEKNIS ANALISIS DATA

Analisis data dilakukan secara kualitatif dimana yang dibahas adalah permasalahan yang terjadi pada instansi pemerintahan dalam hal ini adalah Pembangunan Negara Daerah Perbatasan (Studi pelayanan kesehatan Puskesmas Tanjung Batu Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun tahun 2015). Metode penelitian kualitatif menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses peristiwa tertentu. Data yang telah terkumpul dalam data mentah akan dikelompokkan berdasarkan jenis kemudian diolah. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan dalam bentuk kalimat untuk dianalisis dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Negara Daerah Perbatasan (Studi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tanjung Batu Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Tahun 2015)

A. Kapasitas Kelembagaan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kecamatan Kunder

Pada kapasitas kelembagaan pelayanan kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan memiliki kewenangan yang besar untuk melakukan pengelolaan kesehatan terutama di daerah perbatasan. Berikut ini tahapan dalam kapasitas kelembagaan meliputi : kapasitas perencanaan,

kapasitas pelaksanaan dan kapasitas evaluasi.

Kapasitas Perencanaan dalam perencanaan nya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun adalah berdasarkan undang-undang kesehatan yang dapat memaksimalkan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan dan daerah pulau-pulau kecil lainnya. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan dan belum didukung dengan sistem informasi tenaga kesehatan yang memadai.

B. Dimensi Kekuatan (*Strength*) dan Ruang Lingkup Peranannya (*Scope*)

Dimensi Kekuatan menitikberatkan pada kemampuan Negara merencanakan dan menjalankan berbagai kebijakan dan memberlakukan Undang-Undang secara bersih dan transparan. Dimensi inilah menurut Fukuyama harus diperkuat untuk menciptakan daya dukung negara dalam membangun cita-cita yang diinginkan. Dalam artian bahwa Pemerintah Daerah harus mempunyai kekuatan berupaya mendukung peningkatan pelayanan kesehatan untuk membangun kesehatan yang optimal tercapainya yang diinginkan khususnya di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil lainnya.

Kapasitas pelaksanaan dalam pelayanan kesehatan di kecamatan kunder perencanaan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah dan dinas terkait yakni dinas kesehatan. Perencanaan yang dilakukan bahwa pelaksanaannya tidak berjalan karena ketersediaan tenaga kesehatan belum terlaksana sepenuhnya.

Sehingga didalam kapasitas evaluasi pemerintah akan tetap melengkapi sarana dan prsarana, kebutuhan tenaga kesehatan yang masih minim di daerah pulau-pulau yang jarak tempuh membutuhkan waktu yang lama menuju Rumah sakit induk.

Berdasarkan Dimensi Kekuatannya di dalam pelayanan kesehatan yang sudah berhasil direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, berupa dari segi perencanaan pelayanan kesehatan dan pelaksanaannya.

Perencanaan disini dalam artian yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah dalam program terhadap penurunan angka tingkat kematian bayi dan balita setiap tahunnya mengalami peningkatan di daerah perbatasan dan daerah pulau-pulau kecil lainnya. Hal ini dibuktikan bahwa angka tingkat kematian bayi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Angka 1 tahun 1000 Kematian Bayi (AKB) dan Balita Kabupaten Karimun.

Pelaksanaan dalam pelayanan kesehatan yang sudah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil untuk penurunan angka tingkat kematian bayi dan balita. Untuk wilayah perbatasan terdekat oleh pemerintah daerah pembangunan pustu sudah dilaksanakan kemudian pustu di setiap wilayah sudah dibangun poskesdes. Berdasarkan dimensi kekuatan menurut Fukuyama bahwa kemampuan negara dalam

merencanakan dan menjalankan kebijakan merupakan suatu keberhasilan pencapaian kinerja kabupaten karimun yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam Pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil dalam penurunan angka kematian bayi (AKB) 8% dan angka kematian balita (AKABA) sekitar 9%.

Dalam Dimensi Cakupan atau Raunag Lingkup Peranan nya (Scope) fungsi-fungsi negara yang dibagi menjadi tiga kategorisasi yaitu Fungsi Minimalis, Fungsi Menengah dan Fungsi Aktivistis.

a. Fungsi Minimalis

Fungsi Minimalis dalam artian menyediakan kebutuhan publik dan kesehatan masyarakat. bahwa barang-barang yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan seperti fasilitas kesehatan jumlah Stock Obat-obatan, jumlah Alat Kesehatan (ALKES), Gedung dan lain-lain. Berdasarkan konsep Fukuyama terkait dengan fungsi negara yakni fungsi minimal, hal seminimal mungkin belum bisa terpenuhinya dalam hal kebutuhan masyarakat dan kesehatan masyarakat seperti terpenuhinya stock obat-obatan dan alat kesehatan, yang terdapat di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil lainnya. Sehingga dapat terlihat jauh lebih rendah yang diharapkan dari fungsi minimal oleh konsep fukuyama tersebut.

Fungsi Menengah disini menurut Fukuyama salah satunya memperbaiki kualitas informasi dan perlindungan lingkungan. Pemerintah Daerah membuat suatu program untuk melakukan sosialisasi tentang kesehatan di daerah perbatasan dan

pulau-pulau kecil. Karena program kesehatan sangat penting bagi masyarakat. Seperti Program Karimun Bersih, Program penyuluhan kesehatan masyarakat dan Penilaian akreditasi puskesmas.

Fungsi Aktivis mengkoordinasi aktivitas swasta dan mengumpulkan inisiatif, dalam artian bahwa pemerintah daerah melibatkan pihak swasta dalam peningkatan kesehatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembangunan Negara Daerah Perbatasan (Studi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Tahun 2015). Bahwa pelayanan kesehatan belum berjalan optimal karena dilihat dari sisi tenaga kesehatan masih minimnya di bidang keahlian sehingga perlu diadakan pelatihan dan kurang minat untuk menjadi tenaga dokter spesialis di Kabupaten Karimun dan di puskesmas tanjung batu belum adanya dokter spesialis.
2. Di dalam Dimensi Kekuatan dan Dimensi Ruang Lingkup Peranannya (*Scope*) dilihat dari fungsi negara bahwa untuk fungsi minimalis seperti keterbatsannya stock obat-obatan, alat kesehatan belum terpenuhi sehingga menjadi penghambat dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Perlunya perhatian pemerintah dengan meningkatkan jumlah anggaran dan bantuan ke puskesmas di kabupaten

karimun terutama puskesmas tanjung batu kecamatan kundur.

B. Saran

Adapun saran-saran dari penulis yang mungkin berguna bagi puskesmas tanjung batu kecamatan kundur kabupaten karimun yaitu :

1. Puskesmas Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun terutama di bidang keahlian tenaga kesehatan perlu ditingkatkan dan diadakan pelatihan agar dapat pasien dapat terlayani dengan maksimal.
2. Puskesmas Tanjung Batu Kabupaten Karimun harus lebih meningkatkan jumlah stock obat-obatan, Alat Kesehatan yang sering dibutuhkan pasien saat berobat.
3. Puskesmas Tanjung Batu lebih insiatif dalam memperhatikan bahwa kekurangan yang ada di puskesmas bisa teratasi.
4. Pemerintah harus lebih memperhatikan anggaran yang dibutuhkan oleh puskesmas dalam menjalankan kegiatannya. Agar keterbatasan dana dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anwar, Khairul, 2011. *Daerah Pinggiran dan Kapitalisme Internasional (Beberapa Implikasi Politi-Ekonomi Kerjasama Indonesia-Singapura Terhadap Daerah Kepulauan Riau*, Jl. Patimura No.9 Gobah Pekanbaru : Alaf Riau Publising

Anwar, Khairul, 2012. *Potensi dan Fenomena Ketergantungan (Studi pada Desa Terdepan di Wilayah Perbatasan Riau-Malaysia-Singapura*, Jl. Patimura No.9 Gobah Pekanbaru : Alaf Riau Publising

Fukuyama, Francis, 2004. *State Building : Governance and World Order in the 21st Century*. Terjemahan A.Zaim

Setyawan Salam, Dharma, 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Djambatan

Husaini, Usman. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara

Marzuki, M.M, 2003. *Metodologi Riset*. Jogjakarta : PT. Prasetia Widia Pratama. hal.55

Moelong, J.Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Raja Rosadakarya

Mohd. Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghala Indonesia

Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Satori, Djma'an dan Aan Komariah, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta

Jurnal dan Sumber lainnya :

Ari Setyawan, 2008, *Analisis Perbandingan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Komperatif Pembangunan Perbatasan Sebatik-Tawu)*

Asril, M.Pd.2015. *Sejarah Riau : Jati Diri Anak Melayu*. Pekanbaru

Hadi Faudi, 2010, *Problematika Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2013*

Rahman Mulyaman, *Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pertahanan Diwilayah Antar Negara Dalam Konteks Otonomi Daerah*

Rafni Puspita Pohan, 2010, *Pelayanan Publik pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2013*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

WikipediaIndonesia(www.wikipedia.com)

HaluanKepri(www.haluankepri.com)

<http://dokumen.tips/documents/belajar-kapasitaskelmbagaan.h>

